Single Window Service and Information Dissemination in Indonesia

February 11, 2015

Bangalore, India

Ratnawati Muyanto

ILO Country Office Jakarta

Outline

) SWS as dissemination information center
) Current Dissemination Information Methods
i) Indonesian community structure
v) Moving towards community empowerment for disseminating information

ndonesia

Thailand
South China Sea
Bay of Bengal
Andaman Sea
Vietnam
Philippines
Gulf of Thailand
Malaysia
Indonesia
Banda Sea
Arafura Sea
Papua New Guinea
Solomon Sea
Coral Sea
NT
Indian Ocean
Map data ©2014 Goo

SWS is a facility to disseminate programme information to the beneficiaries

Current Institutional Arrangement for Social Protection Programmes

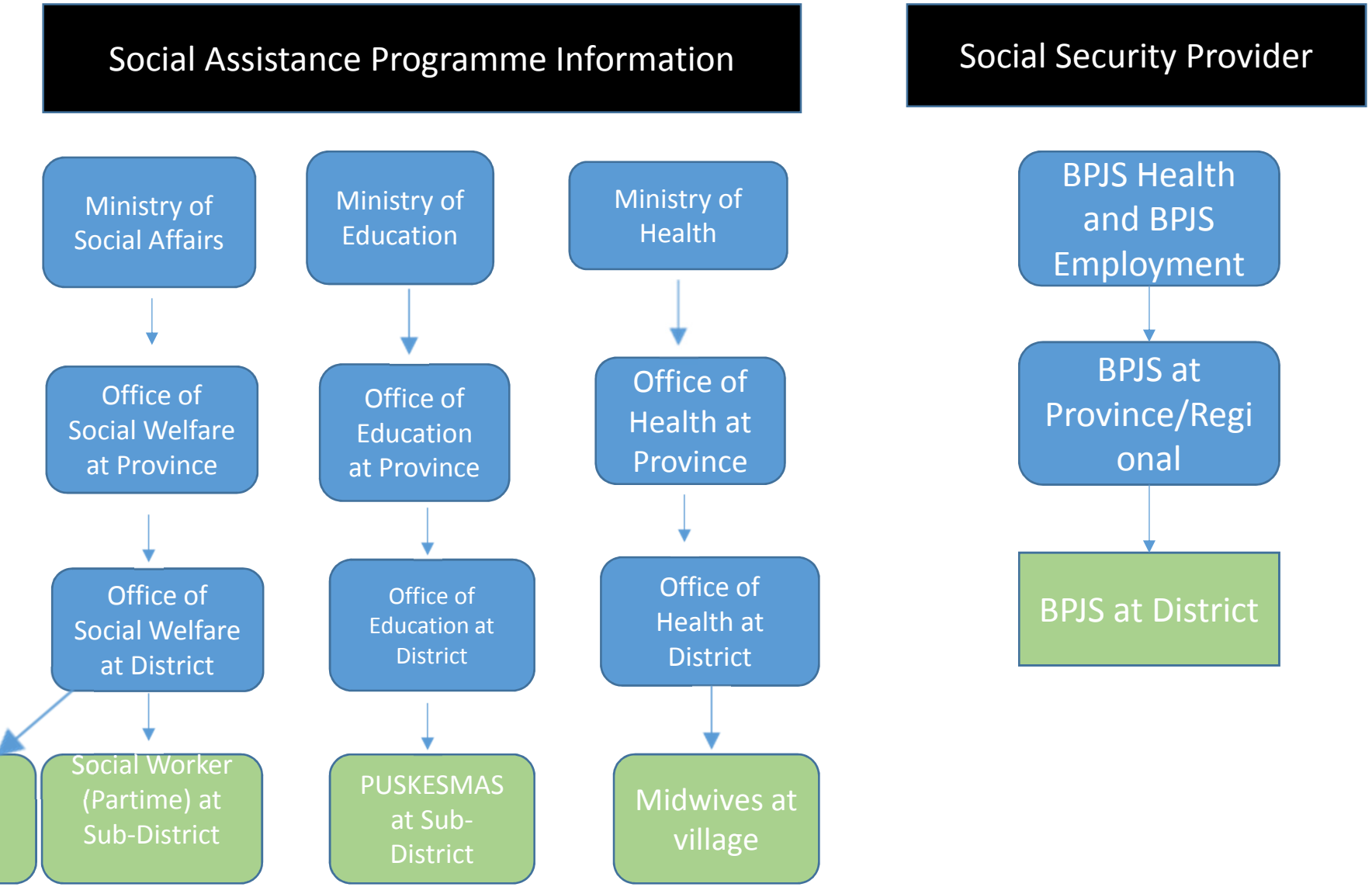

s it an effective way to disseminate programme nformation?

- Social worker at Sub-District level tends to ignore Village Administration role → mismatch information could happen
- Only the beneficiaries knows the targeted programme → others may not aware of existing programme
- Since universal health insurance has been implemented in January 1, 2014, none of people (based on random interview conducted afterwards in Malang District) understands what it is despite the public announcement through national TV on daily basis.

Indonesian Community Structure

GHBORHOOD SERVICE (RT)
DORSEMENT LETTER 1 TO GET NON-NTRIBUTORY SCHEME)

ONE HEAD OF RT

MMUNITY SERVICE (RW)
DORSEMENT LETTER 2 TO TO GET N-CONTRIBUTORY SCHEME)

ONE HEAD OF RW and ONE SECRETARY

LAGE

re are two types of villages ch are DESA (Head of Village is ted, more traditional) and URAHAN (Head of Kelurahan is ointed, administration ction)

SMALL ADM OFFICE (4-5 STAFFS)

POKJANAL POSYANDU
(COORDINATOR → MIDWIFE
(INTEGRATIVE HEALTH SERVI
DELIVERY POINT – MATERNA
CHECKING, INFANT NUTRITI
MONITORING, etc). Its opera
cost is shared by the have in
community and local public

Midwife is technical field officer of Health Office, her operational job is under PUSKESMAS coordination

Moving towards local government and community empowerment for disseminating information

ıage Adm
Office

- Disseminate programmes through tools such as pamphlet, leafle announcement board at public market
- Coordinate the community coordinator (RT, RW, Posyandu coord inform programme to their member

-District
m Office

- Identify existing programmes at Sub-District
- Receive dissemination tools from District
- Cooperate with religious scholar for further dissemination steps
- Provide dissemination tools at Puskesmas (health center), Post Office, Sch

rict Adm
Office

- Coordinate with technical offices to compile their related programmes c standardized form (by PPID – officer for documenting and collecting programme information)
- Compile existing programmes
- Design the dissemination tools and then deliver to Sub-District Office
- Develop cooperation with local TV and newspaper on registration proce

ols: Leaflet on Universal Health Insurance Benefit and Registration ocedure

BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BPJS dibagi dua macam, antara lain:

1. BPJS Kesehatan + Jaminan Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan
   - Jaminan Kecelakaan Kerja
   - Jaminan Hari Tua
   - Jaminan Pensiun
   - Jaminan Kematian

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Jaminan Kesehatan

Adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.

Iuran Jaminan Kesehatan

Adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

- Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah.
- Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta pekerja upah dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja.
- Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dibayar oleh peserta yang bersangkutan.

International Labour Organization (ILO)
Bekerja Sama Dengan
PT. Askes

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Program Jaminan Sosial meliputi

- Jaminan Kesehatan
- Jaminan Kecelakaan Kerja
- Jaminan Hari Tua
- Jaminan Pensiun
- Jaminan Kematian

JAMINAN PELAYANAN

I. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP)
II. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (RJLT dan RITL)
III. Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PKPT)

Meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:

1. Administrasi pelayanan.
2. Pelayanan promotif dan preventif.
3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis.
4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun on operatif.
5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis.
7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.
8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (PKRTL)

Meliputi kesehatan yang mencakup:

1. Rawat inap jalan yang meliputi
   - Administrasi pelayanan.
   - Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesifik oleh dokter spesialis dan subspesialis.
   - Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis.
   - Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
   - Rehabilitasi medis.
   - Pelayanan kedokteran forensik.
   - Pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan
2. Rawat inap yang meliputi:
   - Perawatan inap non intensif.
   - Perawatan inap di ruang intensif.

PENDAFTARAN

ALUR PELAYANAN KESEHATAN

PASIF

AKTIF

MANFAAT AKOMODASI

A. Ruang perawatan kelas III bagi:
   1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan
   2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

B. Ruang perawatan kelas II bagi:
   1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya.
   2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya.
   3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya.
   4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya.
   5. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya.
   6. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.

C. Ruang perawatan kelas I bagi:
   1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya.
   2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya.
   3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya.
   4. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya.
   5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya.
   6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya.
   7. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan lebih dari 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya.
   8. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

Page 1

Disseminating Information through Management Information System Application

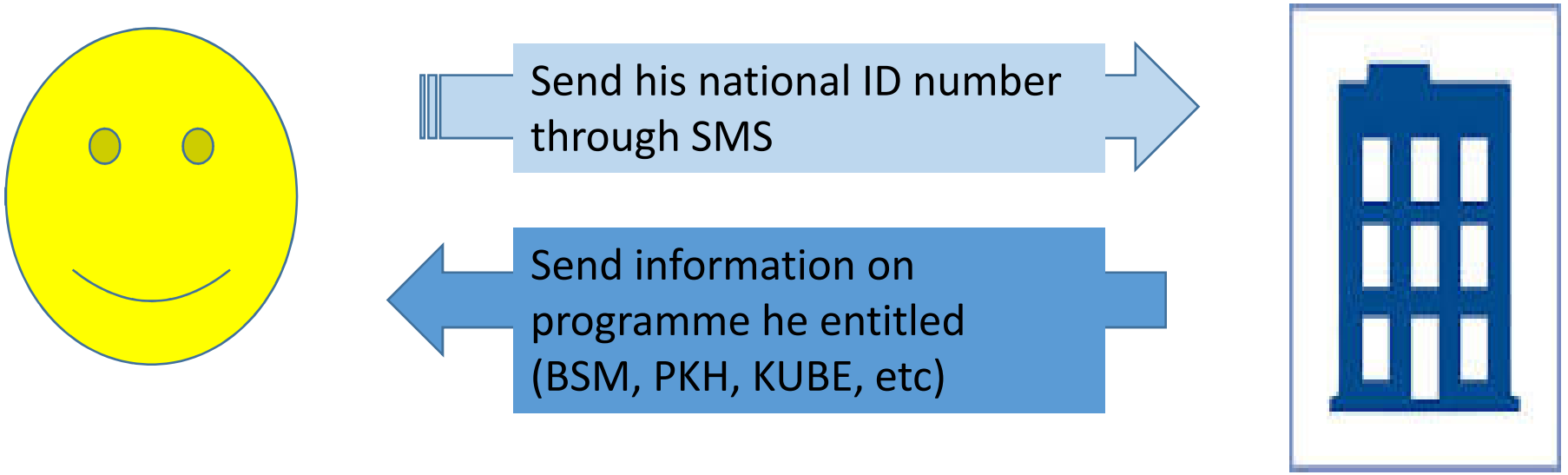

People only receive such a short notification through SMS so that they may not understand BUT they may go to SWS and to contact SWS call center for further programme information. MIS application may not only inform people directly but also increase people's awareness of existing social protection programmes.

Situation at Sub-District Adm Office for Civil Registration

THANK YOU